



KAJIAN HISTORIS: SUMBANGSI DAN GERAKAN SOSIAL MUHAMADIYYAH DI INDONESIA ABAD KE 20 TAHUN 1912

HISTORICAL STUDY: MUHAMADIYYAH'S CONTRIBUTION AND SOCIAL MOVEMENT IN INDONESIA IN THE 20TH CENTURY IN 1912

**Siti Muinah¹, Syadila Auliyah Al-Muzakiyah², Hamliyah Syariati³, Audrey Febriani
Isnanto⁴, Maftuh Ajmain⁵**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: muinah074@gmail.com¹, aulyahsyadila@gmail.com², hamliyahsyariati@gmail.com³,
dreyfeb@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 19-05-2025

Revised : 21-05-2025

Accepted : 23-05-2025

Published : 25-05-2025

Abstract

Muhammadiyah is an Islamic organization that was formed on November 18, 1912 in Yogyakarta, founded by a religious figure, KH. Ahmad Dahlan. This organization was founded as an answer to the struggles and objections faced by Muslims in the 20th century with the aim of purifying Islamic teachings by eliminating practices that were considered inconsistent with the principles of monotheism. This study aims to examine the historical context of the birth of Muhammadiyah, and how Muhammadiyah contributed to education, social, economic, and socio-political fields in Indonesia. This research uses a literature study research method as the main approach in examining the historical context and contribution of Muhammadiyah in Indonesia. This method involves collecting and analyzing various written sources, such as books, journals, articles, and official documents that are relevant to the research topic. The data obtained are analyzed qualitatively to identify historical studies and contributions of the Muhammadiyah social movement to the development of Indonesian society. The results of the study show that Muhammadiyah has contributed in various fields: in education by establishing schools, universities, and Islamic boarding schools; in the social sector through health services, orphanages, and disaster response (MDMC); in the economic sector with cooperatives, SMEs, and Islamic finance; and in politics as a moral force that oversees policies without being involved in practical politics.

Keywords: *Organization, Muhammadiyah, History, KH. Ahmad Dahlan*

Abstrak

Muhamadiyyah merupakan salah satu organisasi Islam yang dibentuk pada tanggal 18 November 1912 yang bertempat di Yogyakarta, yang didirikan oleh seorang tokoh ulama yaitu KH. Ahmad Dahlan. Organisasi ini didirikan sebagai suatu jawaban atas perjuangan dan bantahan yang dihadapi kaum Muslim pada abad ke 20 dengan tujuan untuk memurnikan ajaran Islam dengan menghilangkan praktik-praktik yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tauhid. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana konteks historis lahirnya Muhammadiyah, dan bagaimana sumbangsih Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan sosial politik di Indonesia. Riset ini menggunakan metode penelitian study pustaka sebagai pendekatan utama dalam mengkaji konteks historis dan sumbangsih Muhammadiyah di Indonesia. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kajian historis dan sumbangsih gerakan sosial Muhammadiyah terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah memberikan sumbangsih di berbagai bidang: dalam pendidikan dengan mendirikan sekolah, universitas, dan pesantren; di bidang sosial melalui layanan kesehatan, panti asuhan, dan tanggap bencana (MDMC); di sektor ekonomi dengan koperasi,



UKM, dan keuangan syariah; serta di politik sebagai kekuatan moral yang mengawal kebijakan tanpa terlibat politik praktis.

Kata Kunci: Organisasi, Muhammadiyah, Sejarah, KH.Ahmad Dahlan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki sejarah panjang dalam perkembangan organisasi keagamaan yang turut mewarnai perjalanan bangsa. Salah satu organisasi yang memiliki peran signifikan adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang dibentuk pada tanggal 18 November 1912 yang bertempat di Yogyakarta, yang didirikan oleh seorang tokoh ulama yaitu KH. Ahmad Dahlan. Organisasi ini didirikan sebagai suatu jawaban atas perjuangan dan bantahan yang dihadapi kaum Muslim saat itu, yang tengah berjuang dalam beragam segi kehidupan, termasuk pemahaman agama, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Didorong oleh semangat tajdid (pembaruan), Muhammadiyah menjalankan gerakan Islam yang berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah, yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dengan menghilangkan praktik-praktik yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tauhid (Rusman, 2022).

Kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang surah Ali Imran ayat 102 sampai 104, melahirkan amalan nyata yaitu berdirinya Organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Kajian – kajian serupa terus dikembangkan termasuk mengkaji surah Al-Ma'un ayat 1 – 7 yang diulang – ulang merupakan bukti kongkrit lahirnya amal usaha Muhammadiyah dibidang, seperti: Rumah Sakit, Panti Asuhan, lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh (LAZIS), serta sekolah orang miskin, dll.

Pada awal abad ke 20 istilah Muhammadiyah dikenal dengan istilah gerakan Islam modern serasa kurang pas didengar, sebab dalam penelitian – penelitian keagamaan unsur modern masih mengandung unsur tradisional. Begitu juga sebaliknya, di dalam Islam tradisional terdapat unsur modern. Maka para ahli studi keIslaman diawal abad 21 menggunakan istilah Islam berkemajuan atau Islam Progressif untuk disandingkan dengan Muhammadiyah. Istilah Islam Progressif merupakan paham bahwasannya agama Islam bisa sesuai dengan kondisi zaman apapun. Secara sederhana ketika memahami Islam tidak hanya dalam bentuk tekstual saja, tetapi lebih memahaminya dalam bentuk kontekstual (Mocham, 2020).

Pada abad ke-20, Indonesia menghadapi berbagai tantangan sosial dan politik yang kompleks. Dalam konteks ini, Muhammadiyah tampil sebagai kekuatan sosial yang mendorong perubahan melalui dakwah dan amal usaha. Berbagai lembaga pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan sosial yang digagas Muhammadiyah menjadi wujud nyata dari komitmen organisasi ini untuk menciptakan masyarakat yang berkemajuan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek pendidikan Muhammadiyah, peran tokoh-tokohnya, serta kontribusi ideologinya dalam konteks pembaruan Islam. Namun, masih terbuka ruang untuk menelaah lebih dalam bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan sosial memainkan peran historis dalam membentuk struktur sosial masyarakat Indonesia sejak awal abad ke-20, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, dan respon terhadap tantangan kebangsaan. Kajian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena menitikberatkan pada kontribusi sosial-historis Muhammadiyah secara menyeluruh dalam kurun waktu awal pendiriannya.



Oleh karena itu, pada tulisan artikel ini kami akan menggambarkan realitas gerakan sosial keagamaan di Indonesia dalam tubuh organisasi Muhammadiyah, bentuk konkret dari sumbangsih Muhammadiyah terhadap masyarakat Indonesia. Tujuannya untuk mengeksplorasi secara historis peran dan kontribusi Muhammadiyah dalam membangun masyarakat Indonesia melalui pendekatan sosial-keagamaan yang transformatif dan sistematis, serta menunjukkan relevansinya hingga masa kini.

Dengan demikian, artikel atau kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai gerakan keagamaan muhamadiyah dan sumbangsinya di beberapa bidang yakni pendidikan, sosial, ekonomi dan politik serta dapat melengkapi kajian-kajian mengenai muhamadiyah yang ada sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) untuk mengkaji sumbangsih dan gerakan sosial Muhammadiyah di Indonesia sejak berdirinya pada abad ke 20 tahun 1912. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi Muhammadiyah, serta arsip sejarah yang mendokumentasikan perjalanan organisasi ini dalam berbagai aspek sosial.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti merujuk pada literatur yang membahas peran Muhammadiyah di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kontribusi organisasi tersebut dalam membangun tatanan sosial di Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, perkembangan, serta dampak gerakan sosial Muhammadiyah terhadap masyarakat. Melalui metode ini, penelitian mampu menyusun gambaran historis yang komprehensif tentang bagaimana Muhammadiyah merespons tantangan sosial pada masanya, serta merumuskan kontribusi nyata yang telah diberikan dalam upaya menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konteks Historis Lahirnya Muhammadiyah

Sebelum mengupas sejarah berdirinya Muhammadiyah, ada baiknya kita pahami dulu makna kata Muhammadiyah. Secara Bahasa, kata ini berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata "محمد" (Muhammad), yang merupakan nama Nabi dan Rasulullah terakhir. Nama Muhammad sendiri memiliki arti "yang terpuji." Penambahan akhiran "yā'nisbah" ditambahkan untuk menunjukkan suatu golongan, atau bentuk penghormatan, yang berarti pengikut. Oleh karena itu, Muhammadiyah merujuk pada kelompok atau gerakan yang mengikuti ajaran dan praktik (Sunnah) Nabi Muhammad SAW (Nurhayati, 2018).

Muhammadiyah merupakan suatu organisasi Islam yang dibentuk pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 yang bertempat di Yogyakarta, yang didirikan oleh seorang tokoh ulama yaitu KH. Ahmad Dahlan. Nama "Muhammadiyah" pada awalnya diusulkan oleh Muhammad Sangidu yaitu seorang pembaharu sekaligus Ketib Anom Keraton Yogyakarta. Ia merupakan saudara, murid, dan sahabat karib Ahmad Dahlan, yang kemudian menjadi pimpinan Keraton Yogyakarta. Usulan Muhammad Sangidu diterima setelah Ahmad Dahlan melaksanakan salat istikharah. Pemilihan nama Muhammadiyah dimaksudkan agar para anggotanya dapat



meneladani Nabi Muhammad dalam segala tindakannya. Organisasi ini menjadi wadah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang sejalan dengan tujuannya. Ahmad Dahlan menegaskan prinsip ini melalui wasiatnya kepada Muhammadiyah: "Hiduplah dalam Muhammadiyah dan janganlah mencari nafkah dalam Muhammadiyah," yang menegaskan bahwa nilai-nilai Muhammadiyah yang berlandaskan Amar Ma'ruf Nahi Munkar harus diamalkan dengan ikhlas dan suci (Sampoerno, 2001).

Muhammadiyah adalah suatu organisasi sosial keagamaan yang memiliki pengaruh signifikan di Indonesia. Pendirian organisasi ini berkaitan dengan gerakan reformasi ajaran Islam di Timur Tengah yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berupaya mengatasi kemandegan pemikiran umat Islam pada masanya yang dianggap terkungkung oleh dogma-dogma yang sudah ketinggalan zaman. Gerakan yang dikenal dengan nama "Muhyi Atsar Salaf" ini bertujuan untuk menghidupkan kembali ajaran asli yang diwariskan oleh para sahabat Nabi serta para Tabi'in (Suryana).

Dengan jutaan anggota, Muhammadiyah telah berkembang pesat menjadi organisasi sosial-keagamaan yang memiliki pengaruh yang signifikan. Berawal dari Yogyakarta, kota yang terkenal dengan warisan pendidikan dan budayanya, organisasi ini telah berkembang hampir di seluruh Indonesia. Dalam upayanya, Muhammadiyah menempatkan penekanan kuat pada gerakan dakwah, yang menyerukan orang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah ini mencakup berbagai ajaran dari Al-Qur'an, seperti mempromosikan perdamaian, iman kepada Allah, mengejar surga, dan melakukan kebaikan. Dakwah Muhammadiyah dipandang sebagai upaya rekonstruksi sosial yang komprehensif, yang terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan zaman yang berubah. Untuk mendukung dakwahnya, Muhammadiyah telah mendirikan banyak lembaga, termasuk sekolah, rumah sakit, universitas, masjid, dan pondok pesantren. Selain itu, Muhammadiyah aktif di sektor ekonomi, memberdayakan masyarakat melalui inisiatif seperti pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk membantu pemilik usaha kecil (Suryana).

Pemikiran Ideologi Muhammadiyah

Meskipun wacana tentang "matinya ideologi" terus berkembang sejak era Perang Dingin, ideologi tetap ada dan menjadi bagian dari berbagai gerakan sosial, termasuk di kalangan Muslim, meskipun tidak sepopuler atau sekeras di masa lalu. Di tengah arus pluralisme yang mewarnai akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, upaya untuk menegaskan identitas kelompok terus berlanjut, yang sering kali dilihat sebagai bentuk perlawanan atau cara untuk bertahan hidup di era globalisasi yang semakin tidak terbatas. Dalam konteks ini, berbagai bentuk radikalisme ekstrem atau fundamentalisme, baik dari sayap kiri maupun sayap kanan, sering kali muncul. Tariq Ali menyebut fenomena ini sebagai "benturan fundamentalisme (Nurhayati)."

Secara etimologis, kata ideologi berasal dari *idea*, yang berarti pemikiran, konsep, atau gagasan, serta *logoi* atau *logos*, yang bermakna pengetahuan. Oleh karena itu, ideologi dapat diartikan sebagai kajian mengenai ide, keyakinan, atau gagasan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis, yaitu Antoine Destutt, yang mendefinisikannya sebagai "*science of ideas*". Ia mendeskripsikan ideologi seperti sekumpulan program yang dirancang untuk menciptakan perubahan dalam tatanan sosial suatu masyarakat (Nurhayati). Charles Glock memandang ideologi sebagai sesuatu yang sangat penting dalam menghadapi perubahan sosial. Sementara itu, menurut Stark, ideologi merupakan gambaran atau visi tentang bentuk masyarakat



yang ideal, sekaligus menjadi panduan utama dalam mewujudkannya (John, 2003). Sejalan dengan pandangan Stark, Riberru menekankan bahwa ideologi adalah suatu sistem pemahaman atau kumpulan gagasan yang menyeluruh, yang tidak hanya berupaya menjelaskan dunia tetapi juga bertujuan untuk mengubahnya (Ribberu, 1986). Ali Syari'ati berpendapat bahwa ideologi merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan keyakinan dan cita-cita yang dianut suatu oleh kelompok, kelas sosial, bangsa, atau ras. Dengan demikian, ideologi dapat diartikan sebagai suatu sistem pemahaman tentang dunia yang mencakup teori perjuangan dan diyakini secara mendalam oleh para pengikutnya dalam mewujudkan tujuan sosial tertentu (Syari'ati, 1982).

Berdasarkan pandangan para ahli, ideologi dapat dipahami sebagai suatu sistem pemahaman yang dianut oleh individu atau kelompok, yang mencakup konsep, pola pikir, dan cita-cita perjuangan tentang kehidupan. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ideologi memiliki tiga unsur utama: *pertama*, Keyakinan mutlak terhadap suatu realitas kehidupan. *Kedua*, Tujuan hidup yang ingin dicapai. *Ketiga*, Strategi atau program tindakan yang selaras dengan nilai-nilai yang diyakini untuk mencapai tujuan tersebut.

Muhammadiyah dipahami sebagai serangkaian keyakinan dan konsep perjuangan yang bertujuan untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat melalui gerakan sosial-keagamaan. Berlandaskan nilai-nilai Islam, ideologi Muhammadiyah tidak bersifat eksklusif atau dogmatis dan tidak membutuhkan kepatuhan buta tetapi sebaliknya, mereka memiliki sifat terbuka.

Haedar Nashir mengatakan bahwa Ideologi Muhammadiyah, dapat didefinisikan sebagai: *Pertama*, Sekumpulan konsep yang sistematis dan menjadi dasar pemikiran dalam menentukan arah serta tujuan hidup. *Kedua*, Pola pikir yang dianut oleh individu atau kelompok tertentu. *Ketiga*, Sebuah pemahaman, teori, dan tujuan yang terintegrasi dalam suatu program sosial-politik yang utuh (Nasir, 2001).

Ideologi Muhammadiyah sudah ada sejak awal berdirinya organisasi ini, yaitu ketika Ahmad Dahlan mulai merumuskan dan memimpin misinya. Secara sederhana, ideologi Muhammadiyah pada masa itu dapat digambarkan sebagai ideologi Islam transformatif, yaitu gerakan dakwah yang berakar pada prinsip-prinsip inti keagamaan yang bertujuan untuk membawa perubahan positif bagi umat dan masyarakat. Bahkan, jauh sebelum konsep Islam transformatif menjadi topik utama dalam pemikiran Islam pada era 1980-an, Ahmad Dahlan dapat telah dianggap sebagai pelopor gerakan transformatif di Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Mas Mansur, Muhammadiyah mulai merancang gerakannya dengan lebih sistematis. Mereka merumuskan gagasan *Dua Belas Langkah*, yang menjelaskan prinsip-prinsip utama tentang Islam serta peran Muhammadiyah dalam mengimplementasikan ajaran Islam melalui organisasi yang terstruktur. Konsep ini menjadi pedoman penting bagi anggota dan pimpinan Muhammadiyah dalam menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang di tengah masyarakat dan negara Indonesia (Nurhayati).

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Muhammadiyah selalu responsif terhadap perubahan sosial dengan menawarkan jawaban konseptual yang dapat menjadi panduan bagi gerakannya. Sistematisasi konsep sebagai respons terhadap dinamika zaman sekaligus mencerminkan pandangan hidup Muhammadiyah, yang pada dasarnya merupakan konsepsi ideologi gerakan ini. Namun, karena rezim Orde Baru menerapkan sistem politik monolitik dengan



Pancasila sebagai ideologi tunggal, Muhammadiyah menyesuaikan format konsepsi ideologinya melalui *Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah* (MKCH). Meskipun demikian, semangat dasarnya tetap sama, yaitu menyediakan kerangka pemikiran fundamental bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan dakwah berbasis misi Islam.

Pada tahun 1942, di bawah kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo, Muhammadiyah juga menyusun Pengantar Hukum Dasar Muhammadiyah. Konsep ini dianggap penting karena membantu menyusun gagasan dan tindakan Ahmad Dahlan serta gerakan Muhammadiyah awal secara sistematis. Selain itu, Pengantar ini dibuat sebagai respons terhadap mudarnya semangat keislaman di kalangan warga Muhammadiyah. Oleh karena itu, Pengantar dan Dua Belas Langkah dapat dianggap sebagai ekspresi prinsip-prinsip ideologis Muhammadiyah (Nurhayati).

Perkembangan konsep ideologi Muhammadiyah yang lebih terstruktur kemudian dituangkan dalam Pernyataan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) yang dibentuk pada tahun 1969 setelah Kongres ke-37 di Yogyakarta pada tahun 1968. Kongres ini menjadi momen penting karena menetapkan arah baru untuk melaksanakan tajdid (pembaharuan) guna membangkitkan gerakan Muhammadiyah dari kemandegannya. MKCH menjadi kerangka dasar yang menguraikan keyakinan dan perspektif Muhammadiyah tentang Islam, perannya dalam masyarakat, dan tanggapannya terhadap dinamika sosial-politik, termasuk sebagai bentuk antisipasi ideologis pada awal era Orde Baru. Inti ideologi Muhammadiyah berakar pada Al-Qur'an, khususnya Surat Ali Imran ayat 104 dan 110.

Sumbangsih Muhammadiyah dalam Gerakan Pendidikan

Pada masa penjajahan kolonial Belanda, kondisi pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat pribumi menghadapi tekanan dan perlawanan kuat dari pemerintah kolonial. Belanda menyadari bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membangun peradaban, sehingga mereka berupaya menjaga rakyat tetap dalam kondisi bodoh dan tidak berpendidikan. Dengan cara ini, kolonialisme dan kristenisasi dapat berjalan tanpa gangguan dari masyarakat asli. Pada saat itu, sistem pendidikan diprioritaskan oleh pemerintah kolonial Belanda daripada pendidikan yang didirikan oleh masyarakat Indonesia. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memenuhi kepentingan kolonial, seperti menyediakan tenaga administrasi dengan upah murah serta mendukung upaya kristenisasi. Disisi lain, pendidikan pribumi sangat sederhana dan biasanya diberikan di pondok pesantren dan surau-surau, dengan penekanan utama pada ajaran agama tanpa banyak memperkenalkan ilmu pengetahuan umum) (Wahrudin, 2021).

Situasi yang memprihatinkan ini mendorong K.H. Ahmad Dahlan untuk mendirikan sekolah bahkan sebelum berdirinya Muhammadiyah. Pada tahun 1911, ia membuka sekolah dengan sepuluh siswa, di mana ia mengajar ilmu agama, dan rekan-rekan pemerintah lainnya membantu mengajar mata pelajaran umum. Meskipun sekolah ini menyerupai lembaga lain, kurikulumnya berbeda, karena menggabungkan pendekatan pendidikan holistik. Kurikulum sekolah Muhammadiyah menekankan pendidikan agama Islam sebagai inti, mengintegrasikannya dengan mata pelajaran lain. Didorong oleh semangat untuk meningkatkan pendidikan bangsa, K.H. Ahmad Dahlan menamakan sekolah tersebut Madrasah Ibtidaiyah Diniyyah Islamiyyah, yang bertujuan untuk menanamkan pendidikan agama Islam dan menumbuhkan pengembangan generasi yang berakhlak mulia (Zuhairin, 1986).



Gerakan pendidikan Muhammadiyah memiliki empat fungsi atau perspektif utama. Fungsi-fungsi tersebut adalah: *pertama*, sarana pendidikan dan pengembangan intelektual; *kedua*, bentuk pengabdian kepada masyarakat; *ketiga*, gerakan dakwah melalui "amar ma'ruf nahi mungkar"; dan *keempat*, wadah pengembangan kader.

Tujuan pendidikan Muhammadiyah sejalan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Tujuan awalnya adalah untuk memberi tahu orang-orang di wilayah karesidenan Yogyakarta tentang ajaran Nabi Muhammad SAW dan memberi mereka bimbingan dalam praktik Islam. Setelah Muhammadiyah berkembang di luar Yogyakarta, fokusnya beralih untuk mempromosikan dan memajukan ajaran Islam kepada para pengikutnya. Akhirnya, pada tahun 1977, tujuan resmi dari pendidikan Muhammadiyah yang lebih luas dijabarkan secara formal sebagai berikut: untuk membina umat Islam yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara(Wahrudin).

K.H. Ahmad Dahlan mengatakan bahwa pendidikan merupakan cara bagi kaum muslim untuk mengubah cara mereka berpikir, beralih dari jangka pendek ke jangka panjang. Beliau bermaksud untuk melakukan reformasi pendidikan agar menjadi lebih dinamis dan mendorong pemikiran kritis, sehingga umat Islam terbebas dari kebodohan. Sistem pendidikan dipulihkan oleh KH. Ahmad Dahlan dengan menggabungkan metode pendidikan Islam tradisional yang berpusat di pesantren dengan metode pendidikan Barat. Meskipun kedua model pendidikan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, namun perpaduan keduanya dimaksudkan untuk menciptakan sistem yang lebih efektif. Melalui pendekatan ini, K.H. Ahmad Dahlan berupaya untuk menghasilkan peserta didik yang berkepribadian utuh, bermoral kuat, dan mampu memberikan sumbangan positif bagi masyarakat. Visi ini tercermin dalam tujuan pendidikan beliau yaitu melahirkan kaum muslim yang berkualitas, yang menguasai ilmu agama (ahli ilmu keislaman), memiliki wawasan umum yang luas, dan bersemangat untuk memajukan masyarakat(Wahrudin).

Pendidikan agama dan pembentukan lembaga pendidikan adalah langkah pertama Muhammadiyah dalam memperbaiki pendidikan. Sekolah "al-Qim al-Arqa" didirikan pada tahun 1918, dan Pondok Pesantren Muhammadiyah didirikan dua tahun kemudian di Kauman. Hingga tahun 1923, Muhammadiyah telah berhasil mendirikan lima jenis sekolah, yaitu 32 Volkschool (sekolah dasar lima tahun), 8 Hollands Inlandse School (HIS), 1 Schakelschool (sekolah lima tahun yang terhubung dengan MULO), 14 Madrasah, dan 1 Sekolah Keguruan dengan jumlah siswa 4.000 orang dan guru 119 orang. Muhammadiyah juga membangun institusi pendidikan agama, seperti Madrasah Diniyah di Minangkabau. Pondok Pesantren Muhammadiyah didirikan pada 8 Desember 1921 untuk lembaga khusus mengajar guru agama(Karel, p. 55).

Pendidikan Muhammadiyah mengalami perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) hingga jenjang pendidikan tinggi (S1, S2, dan S3). Pada tahun 2010, Muhammadiyah telah menyelenggarakan 4.623 TK, 6.723 PAUD, 15 Sekolah Luar Biasa, 1.137 Sekolah Dasar, 1.079 Madrasah Ibtidaiyah, 347 Madrasah Diniyah, 1.178 SMP, 507 Madrasah Tsanawiyah, 158 Madrasah Aliyah, 589 SMA, 396 SMK, 7 Muallimin / Muallimat, 101 Pondok Pesantren, dan 3 SMA Farmasi. Muhammadiyah telah mendirikan 40 Universitas, 93 Sekolah Tinggi, 32 Akademi, dan 7 Politeknik di bidang pendidikan tinggi.

Muhammadiyah telah meraih pencapaian yang luar biasa dalam bidang pendidikan hingga saat ini. Tidak mengherankan bahwa pendidikan berada di antara pencapaian terbesar organisasi



ini. Muhammadiyah menyadari bahwa pendidikan merupakan bagian penting dalam kemajuan bangsa dan negara, sehingga berkomitmen untuk melahirkan generasi yang cerdas serta berakhlak mulia sebagai aset berharga untuk kemajuan bangsa. Muhammadiyah terus menjadi garda terdepan dalam menangani masalah dan tantangan pendidikan(Wahrudin).

Sumbangsih Muhammadiyah dalam Gerakan Sosial

Muhammadiyah telah menunjukkan tujuan sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan sejak berdirinya, terutama selama penjajahan Hindia-Belanda. Saat itu, rakyat Indonesia mengalami berbagai bentuk penindasan dan penderitaan, baik secara fisik maupun mental-spiritual, yang berdampak pada perubahan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Penjajah memperlakukan penduduk pribumi dengan kejam dan tidak berperikemanusiaan. Meskipun berada dalam kondisi keterpurukan, seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan marginalisasi, semangat perjuangan bangsa tidak pernah padam. Mereka tetap berjuang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga akhirnya berhasil meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda.

Hubungan agama Islam terdiri dari dua jenis utama: hubungan dengan Allah SWT, disebut "hablun minallah," dan hubungan dengan sesama manusia, disebut "hablun minannas." Dalam kaidah fiqih membahas ibadah sebagai cara untuk menunjukkan hubungan dengan Allah, sedangkan ilmu akhlak membahas etika sebagai cara untuk menunjukkan hubungan dengan sesama manusia. Al-Qur'an dan Hadits memberikan penjelasan yang jelas tentang ibadah dan etika, sehingga menjadi bagian penting dari ajaran Islam.

Berdasarkan konsep ini, menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, dan membantu kaum dhuafa merupakan bagian dari ajaran Islam, sebagaimana shalat dan zakat juga termasuk dalam ajaran Islam. Dalam perspektif fikih, tiga amalan pertama dikategorikan sebagai kewajiban *kifayah*, sedangkan dua yang terakhir, yaitu shalat dan zakat, merupakan kewajiban *'ain (fardhu 'ain)*. Muhammadiyah memandang bahwa kedua jenis kewajiban ini memiliki nilai dan kepentingan yang setara. Tiga amalan pertama tergolong dalam *hablun minannas* (hubungan sosial), sementara shalat dan zakat termasuk dalam *hablun minallah* (hubungan dengan Allah).

Menurut Muhammadiyah, gerakan sosial merupakan bagian dari muamalah duniayah. Muhammadiyah telah menjadi lembaga pelopor dalam upaya filantropi dan pembelaan mustad'afin (yang tertindas) di Indonesia, misi yang terus mengilhami gerakan sosial bersama masyarakat. Gerakan sosial merupakan cara Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui tindakan, memberikan layanan konkret seperti perawatan kesehatan, termasuk pendirian rumah sakit dan menawarkan pengobatan gratis kepada masyarakat luas, tidak terbatas pada warga Muhammadiyah. Gerakan sosial ini adalah jenis dakwah yang menekankan tindakan nyata. Nabi Muhammad SAW melakukannya dengan tujuan untuk mendamaikan dan menyatukan kaum Muhajirin dan Anshar. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dakwah sosial dapat dilaksanakan melalui berbagai metode ilmiah. Muhammadiyah menyebutnya dakwah kemasyarakatan(Rohmansyah).

Gerakan sosial yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam di masa-masa di mana agama itu hanyalah doktrin yang tidak memiliki bukti substansial. Muhammadiyah memulai gerakan sosial dengan mendirikan berbagai lembaga untuk menangani serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya di lingkungan



Muhammadiyah dan masyarakat muslim pada umumnya. Inisiatif-inisiatif tersebut meliputi: Pertama, Pembentukan lembaga pendidikan, baik formal maupun informal. Kedua, Pembentukan tempat-tempat ibadah, seperti masjid dan mushola. Ketiga, Pembentukan panti asuhan dan panti jompo. Keempat, Pembentukan rumah sakit PKU Muhammadiyah. Kelima, Pembentukan lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Keenam, Pembentukan lembaga penanggulangan bencana, yang dikenal dengan nama Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) (Rohmansyah).

Gerakan Muhammadiyah melakukan gerakan sosial dengan tiga pilar, diantaranya: Pertama, Pelayanan Pendidikan: Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin untuk mendirikan berbagai institusi pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang paling dihargai dalam sejarah Indonesia karena peran besarnya dalam pendidikan. Tidak dapat disangkal bahwa tujuan utama KH Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah adalah untuk mengatasi ketertinggalan pendidikan Indonesia. Kedua, Pelayanan Kesehatan: Pada Muhammadiyah mendirikan Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) pada tahun 1918, yang kemudian dijadikan bagian khusus dalam organisasi pada tahun 1921. Seiring berkembangnya zaman, pada tahun 1926 Muhammadiyah mendirikan klinik di beberapa kota seperti Surabaya, Malang, dan Surakarta, selain yang ada di Yogyakarta. Layanan kesehatan Muhammadiyah saat ini dikelola oleh Majelis Pembina Kesehatan Umum. Majelis ini bertugas mencapai visi Muhammadiyah tahun 2025 yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Hingga kini, Muhammadiyah telah mengelola 457 fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan rumah bersalin. Semangat warga Muhammadiyah untuk berkontribusi di bidang kesehatan terus berkembang, yang salah satunya didorong oleh semakin banyaknya lulusan Muhammadiyah yang menempuh pendidikan di fakultas kedokteran. Ketiga, Pelayanan Sosial: Selain pendidikan yang menjadi faktor utama dalam pendirian Muhammadiyah, aspek ekonomi juga berperan penting dalam mendorong lahirnya organisasi ini. Jika pendidikan bertujuan untuk mengubah individu dari kebodohan menuju kecerdasan, maka bidang ekonomi difokuskan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar mereka dapat hidup lebih layak dan berkecukupan.

Upaya Muhammadiyah dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan mencakup berbagai program, seperti pembinaan anak yatim dan fakir miskin, perbaikan daerah kumuh dan tertinggal, pendampingan bagi anak jalanan dan pekerja anak, dan pengelolaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, dan balai kesehatan masyarakat. Muhammadiyah juga terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dan mendukung upaya petani dan nelayan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Nurhayati).

Sumbangsih Muhammadiyah dalam Gerakan Ekonomi

K.H. Ahmad Dahlan memberikan contoh untuk menggerakkan secara bersamaan. Pendekatan ini mencerminkan cara pandangya terhadap Islam yang seimbang, layaknya dua sisi mata uang keduanya harus selaras agar memiliki nilai dan dapat berfungsi dengan baik. Demikian pula dalam menjunjung tinggi ajaran Islam, Oleh karena itu, Muhammadiyah membangun kekuatan ekonominya melalui dakwah yang ditujukan kepada anggota, simpatisan, serta masyarakat yang terlibat dalam berbagai amal usaha Muhammadiyah.

KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan



karena memiliki kekuatan sumber daya, seperti kekuatan iman, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Sebagai pendiri, ia memahami bahwa ketiga elemen tersebut dalam menciptakan nilai-nilai gerakan. Selama awal berdirinya, dakwah Muhammadiyah dibantu oleh orang-orang yang aktif secara ekonomi, berpendidikan, dan beragama, sehingga mereka dapat menyebarkan nilai-nilai Islam ke wilayah Indonesia yang belum banyak mengenal Muhammadiyah. Dengan kata lain, masyarakatnya tetap sangat menganut adat istiadat. Jika dibandingkan dengan masa-masa awal Muhammadiyah, ketika dakwahnya sangat bergantung pada donatur, terutama dari para pimpinan organisasi, Muhammadiyah sekarang memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa (Fadul, 2019).

Model gerakan ekonomi Muhammadiyah dapat dikategorikan ke dalam dua pendekatan utama, yaitu *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan *bottom-up* berfokus pada inisiatif dari anggota organisasi yang mendirikan serta mengelola badan usaha berbasis amal untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, pendekatan *top-down* berasal dari tingkat pimpinan dan diarahkan kepada anggota organisasi (Fadul, 2019). Salah satu contohnya adalah program usaha ekspedisi yang dicanangkan oleh Pimpinan Pusat, di mana anggota di tingkat lokal diberikan kesempatan untuk membuka cabang. Menurut M. Amien Rais, model ekonomi ini harus mencakup tiga elemen penting. Pertama, pengembangan amal usaha Muhammadiyah sebagai pilar dalam memperkuat ekonomi organisasi. Kedua, pertumbuhan organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Ketiga, pemberdayaan ekonomi warga Muhammadiyah dengan mendorong serta membina usaha yang mereka miliki (Wahrudin).

Dengan misi dakwah yang luas dan beragam, Muhammadiyah memiliki potensi besar dalam mengembangkan serta merancang model gerakan ekonomi yang produktif. Peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal jika Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan majelis terkait serta berbagai amal usaha, seperti rumah sakit dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika sektor-sektor tersebut dikelola dengan profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi, maka kebutuhan operasionalnya, termasuk penyediaan alat tulis kantor, dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Peluang ini tidak hanya memperkuat perekonomian Muhammadiyah secara internal, tetapi juga memberikan dampak positif secara eksternal dengan meningkatkan perputaran ekonomi dalam lingkungan amal usaha Muhammadiyah (Nasri Dkk, 2024).

Secara internal, Muhammadiyah melibatkan keluarga besarnya, termasuk anggotanya, organisasi otonom, dan lembaga amal, untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam Muhammadiyah atau untuk memfasilitasi sirkulasi kepentingan melalui organisasi. (Ilham Dkk, 2021) Secara eksternal, Muhammadiyah menjalin hubungan dengan lembaga yang sejalan dengan prinsip-prinsipnya, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Islam, seperti dalam upaya untuk mengakhiri kemiskinan dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi umat. Potensi ini, baik di dalam maupun di luar Muhammadiyah, sangat penting untuk kiprahnya di bidang ekonomi dan membutuhkan pengelolaan yang cermat (Wahrudin).

Gerakan ekonomi Muhammadiyah mulai eksis sejak awal berdirinya organisasi ini yaitu pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh KH. Ahmad Dahlan. Sejak awal, Muhammadiyah tidak hanya fokus pada dakwah dan pendidikan, tetapi juga memiliki perhatian besar pada pemberdayaan ekonomi umat. Pada periode awal (1912–1945), Muhammadiyah membangun lembaga-lembaga ekonomi seperti koperasi, badan usaha, dan berbagai aktivitas ekonomi berbasis komunitas. Salah



satu bentuk awalnya adalah pendirian “koperasi simpan pinjam” yang bertujuan membantu anggotanya keluar dari jeratan rentenir. Memasuki masa pasca-kemerdekaan (1945–1965), Muhammadiyah semakin memperkuat peran ekonominya dengan mendirikan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan unit usaha kecil lainnya. Ini menjadi bagian dari upaya memberdayakan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi nasional(Suwarno, 2016).

Pada periode Orde Baru (1966–1998), Muhammadiyah aktif mengembangkan jaringan koperasi, lembaga keuangan mikro, dan usaha kecil menengah (UKM). Fokusnya adalah membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas dan memperkuat sektor pendidikan ekonomi. Sedangkan Pasca Reformasi (1998-sekarang), Muhammadiyah semakin menegaskan komitmennya dalam gerakan ekonomi melalui pendirian berbagai lembaga ekonomi yang lebih modern seperti Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah (MEK). MEK menjadi penggerak utama dalam memajukan ekonomi umat melalui program kewirausahaan, pengembangan bisnis berbasis syariah, dan optimalisasi peran koperasi serta BMT. Secara keseluruhan, gerakan ekonomi Muhammadiyah terus berkembang dari tahun 1912 hingga sekarang, dengan menyesuaikan strategi dan programnya mengikuti perkembangan zaman. Fokus utamanya tetap pada pemberdayaan ekonomi umat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam(Saguni, 2018).

Gerakan Muhammadiyah dalam Sosial Politik

Dalam *Khittah Muhammadiyah* tahun 1971 dan 1978, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan kebijakan netral dalam politik, khususnya dalam menghadapi Pemilu. Kebijakan ini melarang anggota dan pimpinan Muhammadiyah untuk merangkap jabatan di partai politik, kecuali dalam situasi tertentu dengan izin dari Pimpinan Pusat. Selain itu, *Khittah* juga menetapkan larangan rangkap jabatan dengan organisasi lain yang memiliki visi serupa dengan Muhammadiyah, serta pembatasan dalam kepemimpinan internal organisasi. Larangan ini bukan untuk menghilangkan hak politik anggota, melainkan bertujuan menjaga independensi Muhammadiyah dari kemungkinan konflik kepentingan yang dapat merugikan organisasi. Selain itu, kebijakan ini memastikan adanya pemisahan yang jelas antara peran dakwah dan politik, sehingga keduanya dapat berjalan secara harmonis tanpa saling menghambat, meskipun keduanya memiliki signifikansi yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara(Purwanto, 2024).

Khittah Muhammadiyah tahun 1971 dan 1978 termasuk dalam "*Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*", yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam Tanwir di Denpasar pada tahun 2002. *Khittah* Denpasar ini memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya menguraikan pandangan Muhammadiyah dalam bidang politik, tetapi juga menawarkan solusi atas dilemma “kalau tidak ada partai politik, bagaimana cara menyalurkan aspirasi politiknya?”. *Khittah* tahun 2002 juga menjawab pertanyaan “jika Muhammadiyah memandang Islam sebagai ajaran universal, mengapa tampaknya bertentangan dengan politik?”. Hal ini memperjelas bahwa Muhammadiyah tidak bermusuhan, atau sekuler, terhadap politik. Muhammadiyah meyakini bahwa politik memiliki peran penting, namun harus dipahami sebagai bagian dari *mu'amalah* dan *ijtihadiah*, yang disebut sebagai *al-Umūru al-Dunyawiyyah*. Pemisahan antara aktivitas politik dan dakwah merupakan bentuk ijtihad Muhammadiyah dalam menyikapi dunia politik, dengan pendekatan yang berlandaskan modernisme Islam yang lebih menekankan pada nilai dan konsep dibandingkan sekadar aspek formalisme.



Dalam *Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara* yang dirumuskan dalam Tanwir di Denpasar (*Khittah Denpasar*), Muhammadiyah meyakini bahwa keterlibatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan bagian dari misi dan fungsi dakwah, yang diwujudkan melalui prinsip *amr ma'ruf nahi munkar*. Keyakinan ini telah menjadi bagian dari perjalanan Muhammadiyah sejak era pergerakan, masa awal kemerdekaan, hingga periode setelahnya. Peran tersebut dijalankan melalui langkah-langkah strategis dan taktis yang selaras dengan karakter gerakan, keyakinan, cita-cita hidup, serta *khittah* perjuangan Muhammadiyah. Semua itu menjadi pedoman dalam menjalankan gerakan serta mencerminkan komitmen dan tanggung jawab Muhammadiyah dalam mewujudkan negara yang ideal, sebagaimana konsep "*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*" (Nasir, 2010).

Muhammadiyah menjalankan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui dua strategi utama. Strategi pertama dilakukan melalui aktivitas politik yang berorientasi pada perebutan kekuasaan atau urusan kenegaraan, sebagaimana yang dilakukan oleh partai politik. Strategi kedua adalah melalui aktivitas masyarakat yang mempengaruhi kebijakan negara, seperti yang terlihat pada kelompok kepentingan. Muhammadiyah memainkan peran penting dan aktif dalam dinamika politik Indonesia, sebagaimana dibuktikan oleh keterlibatannya di masa lalu dengan Partai Islam Masyumi. Namun, setelah PP Muhammadiyah mundur dari partai, Masyumi akhirnya bubar dengan sendirinya. Dalam pandangan Muhammadiyah, politik tidak hanya terbatas pada upaya meraih kekuasaan dan mengelola pemerintahan, tetapi juga merupakan bagian dari dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang memiliki cakupan lebih luas dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasca pembubaran Masyumi, Muhammadiyah berupaya menghidupkan kembali keterlibatan politiknya, mengingat organisasi tersebut tidak lagi memiliki platform politik resmi. Meski demikian, banyak anggota Muhammadiyah yang tetap aktif di parlemen, meski tidak lagi mewakili organisasi secara langsung.

Pada 9 Mei 1966, di bawah kepemimpinan KH. Fakhri Usman, Muhammadiyah berupaya menghidupkan kembali Partai Masyumi dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan izin beroperasi kembali. Namun, upaya tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintah. Selanjutnya, mantan Ketua Umum Partai Masyumi mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Soeharto. Sayangnya, permohonan tersebut ditolak dengan alasan yuridis, ketatanegaraan, dan psikologis, yang menyebabkan ABRI mengambil sikap tegas untuk tidak menerima rehabilitasi Partai Masyumi.

Gagalnya upaya rehabilitasi Partai Masyumi mendorong para pemimpin Muhammadiyah untuk mendirikan partai Islam baru yang berdiri secara terpisah dari Masyumi. Kelompok Bulan Bintang kemudian mencari alternatif dengan mendirikan partai baru sebagai solusi atas kebuntuan dalam upaya merehabilitasi Masyumi. Proses ini mengarah pada pembentukan Tim Tujuh yang dipimpin oleh KH. Fakhri Usman, yang pada akhirnya melahirkan Partai Islam di Indonesia (Parmusi). Awalnya, Parmusi dibayangkan sebagai bagian dari upaya filantropis Muhammadiyah di kancah politik. Namun, visi ini terbukti sulit diwujudkan seiring berjalannya waktu. Salah satu penyebabnya adalah kepemimpinan di Parmusi tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ketua Umum Parmusi, Mintaredja, yang ditunjuk pemerintah, kerap menuding elite Masyumi terlibat pemberontakan dalam pidato politiknya. Menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah, Mintaredja mengundurkan diri dari Muhammadiyah, dan



permintaannya diterima, yang menyebabkan dia keluar dari organisasi dan kepemimpinannya.

KESIMPULAN

Kajian historis mengenai sumbangsih dan gerakan sosial Muhammadiyah di Indonesia pada abad ke-20 (tahun 1912) menunjukkan bahwa organisasi ini sejak awal kelahirannya telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Muhammadiyah, yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta, lahir sebagai respons terhadap kondisi sosial, keagamaan, dan pendidikan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Muhammadiyah didirikan dengan tujuan memurnikan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta melakukan pembaharuan (tajdid) dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Ideologi Muhammadiyah bersifat transformatif, berakar pada nilai-nilai Islam namun terbuka dan responsif terhadap perubahan sosial. Konsep ideologi Muhammadiyah terus berkembang dan disistematisasi melalui berbagai rumusan seperti Dua Belas Langkah, Pengantar Hukum Dasar Muhammadiyah, dan Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH).

Muhammadiyah mempelopori pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia dengan mengintegrasikan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum. Organisasi ini mendirikan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan tujuan melahirkan generasi muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Pendidikan Muhammadiyah tidak hanya menjadi sarana pengembangan intelektual tetapi juga sebagai bentuk pengabdian masyarakat, gerakan dakwah, dan wadah pengembangan kader. Muhammadiyah sejak awal berdirinya aktif dalam gerakan sosial sebagai wujud dari pemahaman ajaran Islam tentang hablun minallah dan hablun minannas. Gerakan sosial Muhammadiyah diwujudkan melalui pendirian berbagai lembaga seperti rumah sakit (PKU Muhammadiyah), panti asuhan, panti jompo, lembaga amil zakat (LAZISMU), dan lembaga penanggulangan bencana (MDMC). Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial menjadi pilar utama gerakan sosial Muhammadiyah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meringankan penderitaan.

Muhammadiyah menyadari pentingnya kekuatan ekonomi sebagai penunjang gerakan dakwah dan pemberdayaan umat. Sejak awal, organisasi ini mendorong pengembangan ekonomi berbasis komunitas melalui pendirian koperasi, badan usaha, dan lembaga keuangan mikro (BMT). Gerakan ekonomi Muhammadiyah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara luas, berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dalam Sosial Politik Muhammadiyah memiliki pandangan yang dinamis terhadap keterlibatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun secara organisasi mengambil posisi netral dalam politik praktis (seperti Pemilu), Muhammadiyah meyakini bahwa keterlibatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah bagian dari misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan negara melalui jalur masyarakat dan pernah terlibat dalam partai politik (Masyumi). Khittah Muhammadiyah menjadi pedoman dalam menyikapi dinamika politik dengan tetap menjaga independensi organisasi dan fokus pada nilai serta konsep Islam.

Secara keseluruhan, Muhammadiyah sejak awal berdiri sampai dengan sekarang telah meletakkan fondasi yang kuat bagi gerakan sosial-keagamaan yang memiliki dampak luas di Indonesia. Sumbangsihnya dalam pendidikan, sosial, ekonomi, dan sosial politik menunjukkan



komitmen yang mendalam untuk memajukan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang murni dan relevan dengan perkembangan zaman. Gerakan Muhammadiyah di tahun-tahun awal ini menjadi cikal bakal bagi perkembangan organisasi yang lebih besar dan berpengaruh di masa-masa selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Syari'ati, *Tugas Cendekiawan Muslim* (Shalahuddin Press, 1982)
- Bambang Wahrudin, *Al Islam Dan Kemuhmadiyah: Meretas Jalan Pencerahan* (Unmuh Ponorogo Press, 2021)
- Daoed Sampoerno, *Membina Sumber Daya Manusia Muhammadiyah Yang Berkualitas* (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2001)
- Fabiana Meijon Fadul, 'Peran Muhammadiyah Dalam Perubahan Sosial Masyarakat Tanjung Sakti Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 1930-2015', *Jurnal Studi Islam*, 18 (2019), p. 15
- Haedar Nasir, *Ideologi Muhammadiyah* (TB Suara Muhammadiyah, 2001)
- , *Manhaj Gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khittah, Dan Langkah* (Suara Muhammadiyah, 2010)
- Ilham, Ilham, and Ihwan P. Syamsuddin, 'PENDIDIKAN ISLAM: Telaah Sejarah Sosial Keagamaan Dan Modernisasi Pendidikan Muhammadiyah', *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 5.2 (2021), pp. 199–216, doi:10.52266/tadjid.v5i2.704
- John B. Thompson, *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia* (Ircisod, 2003)
- Mocham, Puspita Handayani, Ima Faizah, dan, 'MODEL GERAKAN DAKWA KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH: Studi Etnografi Di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15.1 (2020), p. 103
- Nasri, Ayisatun, and Ronal Ridhoi, 'Potensi Materi Gerakan Modern Islam Di Indonesia Awal Abad Ke-20 Aebagai Literatur Penunjang Buku Teks', *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 4.1 (2024), p. 39
- Nurhayati, *Muhammadiyah: Konsep Wajah Islam Indonesia* (Suara Muhammadiyah, 2019)
- Purwanto, Haris, 'Kajian Sosial Intelektual K . H . Ahmad Dahlan Dan Kontribusinya Dalam Menggerakkan Pendidikan Islam', 14.4 (2024), p. 81
- Ribberu, *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan: Telaah Etis Dan Kritis* (Gramedia, 1986)
- Rohmansyah, *Kuliah Kemuhmadiyah* (LP3M UMY, 2018)
- Rusman, Asrori, 'Gerakan Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Awal Abad Ke-20', *Al-Hikmah*, 8.1 (2022), p. 59
- Saguni, Muhammad Kasim, 'MUHAMMADIYAH PARADIGMA GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN', *NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4.1 (2018), p. 21
- Siti Nurhayati, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi Dan Sistem Nilai* (Trust Media Publishing, 2018)
- Suryana, Cecep, 'Kiprah Politik Dan Sejarah Organisasi Muhammadiyah Di Indonesia', *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 4.14 (2009), p. 628
- Suwarno, 'Dari Yogyakarta Merajut Indonesia: Perkembangan Muhammadiyah, 1912- 1950', *Akademika*, 21 (2016), p. 205
- Zuhairin, *Sejarah Pendidikan Islam* (Bumi Aksara, 1986)